

ABSTRAK

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Wilayah Kabupaten Lombok Barat)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997. Idealnya kegiatan pendaftaran tanah pada kantor BPN dapat menjamin tertib administrasi pertanahan. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dapat dicapai, ditunjukkan oleh sistem pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, dan teknologi yang tidak mendukung sehingga belum mengakibatkan belum dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan.

Permasalahan yang muncul adalah mengapa kebijakan BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat belum mencapai tertib administrasi pertanahan dan bagaimana konsep BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal*, yang melakukan penelitian terhadap dua aspek yaitu aspek *legal research*, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti *norm* (peraturan perundang-undangan) dan aspek *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Hasil penelitian adalah belum terciptanya administrasi pertanahan disebabkan pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, teknologi yang kurang mendukung dan konsep kebijakan BPN adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap pedoman kerja maupun prosedur kerja dalam kegiatan pendaftaran tanah dan melakukan pemeriksaan terhadap hak atas tanah terkait dengan penguasaan atas tanah, sehingga hak atas tanah akan terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengendalian penguasaan terhadap hak atas tanah.

Saran yang penulis berikan adalah agar BPN lebih aktif dalam meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penguasaan hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah secara konsisten.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Pengawasan dan pengendalian Penguasaan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LAND NATIONAL AGENCY'S POLICY TO THE SUPERVISION AND CONTROL OF LAND RIGHT TENURE (A Case Study of Land Registration in West Lombok Regency)

Land registration is a series of activities undertaken by the government continuously, sustainably and regularly in order to ensure legal certainty. It is based on Article 1 paragraph (1) and Article 3 of the Government Regulation No. 24 of 1997. Ideally, land registration activities at the Land Office can ensure orderly land administration. In fact, it still cannot be achieved that can be seen from the cases of land, the incidence of soil mapping inaccurate, no liability for product certificates of land rights, human resources are not eligible, technologies that are less supportive, resulting in the creation not of administration orderly land.

The problems that arise were why the policy of the National Land Agency for the supervision and control against land rights in West Lombok Regency has not reached the orderly administration of land and how the concept of the National Land Agency for the supervision and control of land right tenure.

The approach method used was a socio-legal approach, which conducts research on two aspects, namely legal research when the object of research is a law in the sense of the norm (legislation), and the aspects of socio-research which uses the method and theory of social science on law to assist researchers in the analysis.

The research results show that the orderly administration of land has not been realized because of the incidence of soil mapping inaccurate, no liability for product certificates of land rights, human resources are not eligible, technologies that are less supportive. The policy concept of the National Land Agency is to improve the monitoring system to the working guidelines and procedures in land registration activities and conduct an examination to land rights associated with land tenure that the land rights will be controlled in accordance with the laws and regulations applicable by performing the control to land right tenure.

The suggestions that the writer gave is that the National Land Agency should be more active in improving the supervision and monitoring of land right tenure in land registration activities consistently.

Keywords: the Land National Agency, Supervision and Control of Land Right Tenure and Land Registration.